



Pengaruh Religiusitas, *Machiavellianism*, Diskriminasi, dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Etika *Tax Evasion*

Firda Nabila¹⁾, Anik Yuliati^{*2)}, Avi Sunani³⁾

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur¹⁻³

Email : 20013010078@student.upnjatim.ac.id, anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id*,
avi.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the effect of religiosity, machiavellianism, discrimination, and tax information on taxpayers' perceptions of tax evasion ethics. The type of research used is a quantitative approach. The population used is WPOP registered at KPP Pratama South Sidoarjo. The number of samples taken was one hundred people through the Slovin formula with purposive sampling technique. The data were analyzed using the PLS method through the SmartPLS 3.0 application. The results and conclusions of this study are religiosity, machiavellianism, and tax information have no effect on taxpayer perceptions of tax evasion ethics, while discrimination has an influence on taxpayer perceptions of tax evasion ethics.

Keywords: *tax evasion, religiosity, machiavellianism, discrimination, tax information.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh religiusitas, *machiavellianism*, diskriminasi, dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*. Jenis penelitian yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan ialah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Jumlah sampel yang diambil ialah sebanyak seratus orang melalui rumus slovin dengan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan metode PLS melalui aplikasi SmartPLS 3.0. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah religiusitas, *machiavellianism*, dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*, sedangkan diskriminasi memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*.

Kata Kunci: *tax evasion, religiusitas, machiavellianism, diskriminasi, informasi perpajakan.*

PENDAHULUAN

Indonesia memerlukan dana yang cukup guna memberi dukungan terhadap pengembangan negara. Pendanaan tersebut salah satunya berasal dari pajak. Pajak ialah iuran yang bertujuan guna mendukung pembiayaan kebutuhan negara dalam mewujudkan kemajuan kesejahteraan publik yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib dan tidak mendapatkan imbalan langsung dari negara (Resmi, 2019). Pajak memiliki sifat memaksa, yaitu wajib pajak diharuskan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akan tetapi, tidak sedikit wajib pajak yang merasa terbebani oleh pajak sebab mengurangi pendapatannya sehingga mereka berkeinginan untuk membayar pajak seminimal mungkin (Mustofa & Suhartini, 2022). Strategi untuk mengurangi kewajiban pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak, yaitu memanfaatkan kekurangan yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya mengurangi pajak secara sah. Namun, apabila penghindaran pajak melibatkan pelanggaran hukum dan peraturan, tindakan tersebut disebut penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu tindakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tidak melaporkan kewajiban pajak, menyusutkan jumlah pajak yang dilaporkan, atau melakukan manipulasi laporan pajak (Sunani, 2018). Akibat penggelapan pajak adalah penurunan penerimaan negara yang berdampak pada berkurangnya pendapatan pemerintah guna memenuhi program pembangunan dan pelayanan publik.

Di Indonesia telah terjadi banyak kasus penggelapan pajak, salah satu contohnya pada 3 Maret 2021 di Sidoarjo, tiga pelaku menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,6 miliar akibat melakukan manipulasi faktur pajak. Kasus ini ditemukan transaksi tidak sah dari beberapa wajib pajak yang terungkap oleh Kanwil DJP Jatim II. Ketiga pelaku bekerja sama untuk memanipulasi faktur pajak guna mengurangi jumlah kewajiban pembayaran PPN (Putra, 2021). Kasus penggelapan pajak ini mencerminkan adanya ketidakpatuhan dari sebagian wajib pajak. Berikut adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di salah satu KPP Pratama Sidoarjo, yaitu di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2018-2022

Tahun	Wajib SPT	SPT Masuk	Tingkat Kepatuhan
2018	53.852	41.947	77,89%
2019	55.192	40.694	73,73%
2020	65.676	51.761	78,81%
2021	69.124	56.595	81,87%
2022	71.151	62.920	88,41%

Sumber: Data KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2018-2022

Pada tabel tersebut, menunjukkan penurunan dan peningkatan tingkat kepatuhan WPOP. Hal ini juga menandakan bahwa tingkat kepatuhan masih di

bawah 100% karena sejumlah wajib pajak yang diharuskan melaporkan SPT belum melaksanakannya. Alasan dibalik belum patuhnya wajib pajak adalah rendahnya kesadaran dan motivasi untuk membayar pajak (Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A., 2021).

Banyaknya kasus penggelapan pajak telah menimbulkan persepsi masyarakat bahwa tindakan tersebut dianggap etis. Penggelapan pajak dipengaruhi oleh pertimbangan etika atau pandangan moral tentang kebaikan atau keburukan. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Islam, A., Rashid, M. H. U., Hossain, S. Z., & Hashmi, R. (2020) serta Afriyani (2023) menyatakan religiusitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Jika seseorang memiliki iman yang semakin kuat, pemahaman yang mendalam, dan konsisten sehubungan dengan prinsip agamanya akan dapat menurunkan persepsi tentang etika penggelapan pajak. Akan tetapi, Saragih & Putra (2021) mengungkapkan bahwa religiusitas tidak dapat dijadikan satu-satunya penentu penilaian moral seseorang, akibatnya religiusitas tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi etis tentang penggelapan pajak.

Kisman & Junaidi (2022) serta Atmoko (2022) mengungkapkan bahwa sifat *machiavellianism* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. *Machiavellianism* merujuk pada kecenderungan seseorang untuk memanipulasi demi mendapatkan keuntungan pribadi, sementara pihak lain mengalami kerugian. Individu dengan sifat *machiavellianism* tinggi cenderung manipulatif dan mencapai kemenangan berbanding dengan individu dengan sifat *machiavellianism* rendah. Namun, Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021) menunjukkan bahwa *machiavellianism* tidak memiliki pengaruh pada persepsi etis penggelapan pajak sebab tindakan tidak sesuai etika dapat dipengaruhi oleh faktor luar.

Rachmadeka & Andayani (2021) serta Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021) mengungkapkan bahwa diskriminasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Diskriminasi perpajakan merujuk pada ketidakadilan yang diterima wajib pajak oleh pihak fiskus. Penerapan *tax amnesty* merupakan salah satu contoh yang dianggap diskriminasi dalam perpajakan (Ramdani, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A., 2022). *Tax amnesty* ialah kebijakan pemerintah memberikan keringanan pajak yang bebas dari hukuman pada wajib pajak yang terlambat membayar atau belum melaporkan aset dengan benar (Yuliati & Santoso, 2020). *Tax Amnesty* dipandang sebagai bonus bagi wajib pajak yang tidak patuh, akibatnya wajib pajak yang taat merasa ini sebagai bentuk diskriminasi atau ketidakadilan. Namun, Pratiwi & Prabowo (2019) mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh diskriminasi pajak sebab

meskipun ada perasaan perbedaan perlakuan oleh aparat pajak, hal tersebut tidak memotivasi mereka dalam melaksanakan penggelapan pajak.

Rachmadeka & Andayani (2021) mengungkapkan bahwa informasi perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Apabila pengetahuan tentang perpajakan tidak mencukupi, tindakan penggelapan pajak dipandang wajar sehingga persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak dianggap beretika. Akan tetapi, Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021) mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh informasi perpajakan sebab sebagian besar wajib pajak tidak sering mengakses situs web Direktorat Jenderal Pajak guna memperoleh informasi perpajakan saat melakukan kewajiban pajak mereka.

Mengacu pada latar belakang tersebut, yaitu terlibatnya wajib pajak dalam penggelapan pajak mengakibatkan hilangnya pendapatan negara yang diperlukan guna mendukung program serta layanan publik dan perbedaan hasil penelitian terdahulu mendorong peneliti mengkaji lebih lanjut pengaruh religiusitas, *machiavellianism*, diskriminasi, dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*. Objek pada penelitian ini ialah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Pada penelitian ini menggunakan teori dan beberapa variabel sebagai berikut.

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) yaitu teori untuk mengukur keinginan seseorang dalam melakukan sesuatu yang menggambarkan hubungan antara keyakinan, sikap, perilaku, dan kontrol perilaku yang dirasakan. TPB memiliki tiga faktor penentu niat secara konseptual independen. Pertama, sikap terhadap perilaku dan merujuk pada sejauh mana seseorang memiliki penilaian yang disukai atau tidak disukai terhadap perilaku yang akan dilakukan. Kedua, faktor sosial yang mengarah pada desakan dari lingkungan sosial yang dirasakan dalam mengambil keputusan melakukan suatu tindakan. Ketiga, persepsi terhadap kendali perilaku, seperti merujuk pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan suatu tindakan (Ajzen, 1991).

2. Religiusitas

Religiusitas adalah keyakinan terhadap Tuhan serta tekad untuk menjalankan prinsip yang ditentukan oleh Tuhan. Agama mampu mengendalikan tindakan seseorang (Matitaputty & Adi, 2021). Variabel penelitian religiusitas diukur dengan lima indikator penilaian, yaitu pentingnya agama dalam hidup, penerapan agama dalam sehari-hari, keyakinan aqidah, sikap kejujuran, dan penerapan akhlak di masyarakat (Vo, T. T. D., Tuliao, K. V., & Chen, C. W., 2022). Skala variabel ini merupakan skala

ordinal sehingga pengukuran variabel ini dilakukan dengan *likert scale* (skala likert). Masing-masing pernyataan dinilai dengan skor satu hingga lima.

3. Machiavellianism

Machiavellianism yaitu kecenderungan seseorang untuk memanipulasi demi mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi orang lain mendapatkan kerugian. Variabel penelitian *machiavellianism* diukur dengan tiga indikator penilaian, yaitu penilaian terhadap tindakan orang lain, kejujuran bertingkah laku, dan penilaian negatif terhadap orang lain (Lestari, 2021). Skala variabel ini merupakan skala ordinal sehingga pengukuran variabel ini dilakukan dengan *likert scale* (skala likert). Masing-masing pernyataan dinilai dengan skor satu hingga lima.

4. Diskriminasi

Diskriminasi yaitu ketidakadilan yang diterima wajib pajak oleh aparat pajak, meliputi tarif dan peraturan pajak yang tidak merata. (Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A., 2021). Variabel penelitian diskriminasi diukur dengan empat indikator penilaian, diantaranya (1) perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras dan kebudayaannya, (2) perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya, (3) diskriminasi terhadap sesuatu yang disebabkan oleh keuntungan pajak, dan (4) kebijakan yang menimbulkan kerugian bagi sebagian pihak (Rambe, 2021). Skala variabel ini merupakan skala ordinal sehingga pengukuran variabel ini dilakukan dengan *likert scale* (skala likert). Masing-masing pernyataan dinilai dengan skor satu hingga lima.

5. Informasi perpajakan

Informasi perpajakan merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan informasi dan kemudahan kepada wajib pajak untuk memenuhi pajaknya. Variabel penelitian informasi perpajakan diukur dengan lima indikator penilaian, diantaranya tingkat pemahaman informasi terkait kewajiban wajib pajak, tingkat pemahaman informasi terkait hak menjadi wajib pajak, tingkat pemahaman informasi terkait sanksi pajak, tingkat pemahaman informasi terkait tarif pajak, dan tingkat pemahaman wajib pajak terkait informasi peraturan perundang-undangan (Rachmadeka & Andayani, 2021). Skala variabel ini merupakan skala ordinal sehingga pengukuran variabel ini dilakukan dengan *likert scale* (skala likert). Masing-masing pernyataan dinilai dengan skor satu hingga lima.

6. Persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion* (penggelapan pajak)

Persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan asumsi atau cara pandang wajib pajak dalam menilai etis atau tidaknya perilaku penggelapan pajak berdasarkan etika, norma, dan peraturan yang berlaku. Variabel penelitian ini diukur menggunakan enam

indikator, diantaranya (1) apabila pengeluaran umum negara tidak didanai melalui pajak, penggelapan pajak dianggap etis, (2) apabila manfaat dari pajak yang dibayar tidak dirasakan, penggelapan pajak dianggap etis, (3) apabila penerapan hukum yang diterapkan tidak kuat, penggelapan pajak dianggap etis, (4) apabila perpajakan ditemukan ketidakadilan, penggelapan pajak dianggap etis, (5) apabila pemerintah terlibat dalam kasus korupsi, penggelapan pajak dianggap etis, dan (6) apabila penggunaan uang pajak dilakukan dengan tidak transparan, penggelapan pajak dianggap etis (Rambe, 2021). Skala variabel ini merupakan skala ordinal sehingga pengukuran variabel ini dilakukan dengan *likert scale* (skala likert). Masing-masing pernyataan dinilai dengan skor satu hingga lima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang diteliti yaitu WPOP nonkaryawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan. Teknik sampling yang digunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitian ini yaitu WPOP nonkaryawan yang memiliki NPWP dan berkewajiban melaporkan SPT. Berdasarkan informasi dari KPP Pratama Sidoarjo Selatan per 29 April 2024, jumlah wajib pajak orang pribadi nonkaryawan yang sesuai kriteria yaitu sebanyak 13.142 orang. Penelitian ini menentukan sampel menggunakan perhitungan rumus slovin dengan batas kesalahan maksimal yang ditolerir 10%. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka sampel yang diambil yaitu sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa kuesioner yang disebarkan kepada responden terkait persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*. Data sekunder berupa sumber bacaan (buku), produk penelitian yang dipublikasikan (artikel), dan data sekunder dari instansi.

Teknik Analisis

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) melalui aplikasi Smart PLS 3.0. Langkah pengujian yang dilakukan meliputi model pengukuran (*outer model*) dan struktural (*inner model*). Model pengukuran digunakan untuk mengukur korelasi antara setiap indikator dan variabel laten yang digunakan dalam uji validitas dan reliabilitas. Dalam melakukan uji validitas dapat merujuk pada validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Sementara itu, dalam menguji reliabilitas menggunakan *internal consistency reliability*. Model struktural mencerminkan hubungan antar setiap variabel laten. Pengujian yang diterapkan untuk mengevaluasi model struktural antara lain *Path Coefficients*, *Coefficient of Determination* (R²), dan *Effect Size* (f²). Pengujian hipotesis menggunakan metode *path coefficients* dengan teknik *bootstrapping*.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Model Pengukuran (*Outer Model*)****Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)**

Validitas konvergen yaitu nilai *outer loading* dengan indikatornya dalam variabel latennya. Suatu model mempunyai validitas konvergen jika *outer loading* > 0,70 (Hair, J. F. J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M., 2017). Berikut ini merupakan hasil pengujian validitas konvergen pada penelitian ini.

Tabel 2. Nilai *Outer Loading*

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
Religiusitas (X1)	R1	0,811	Valid
	R2	0,930	Valid
	R3	0,908	Valid
	R4	0,711	Valid
	R5	0,927	Valid
<i>Machiavellianism</i> (X2)	M1	0,926	Valid
	M2	0,906	Valid
	M3	0,747	Valid
	M4	0,725	Valid
	M5	0,891	Valid
Diskriminasi (X3)	D1	0,872	Valid
	D2	0,900	Valid
	D3	0,851	Valid
	D4	0,892	Valid
Informasi Perpajakan (X4)	IP1	0,808	Valid
	IP2	0,779	Valid
	IP3	0,857	Valid
	IP4	0,861	Valid
	IP5	0,866	Valid
	IP6	0,840	Valid
	IP7	0,853	Valid
	IP8	0,823	Valid
	IP9	0,834	Valid
Persepsi Wajib Pajak tentang Etika <i>Tax evasion</i> (Y)	PWPETE1	0,831	Valid
	PWPETE2	0,809	Valid
	PWPETE3	0,872	Valid

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
	PWPETE4	0,846	Valid
	PWPETE5	0,808	Valid
	PWPETE6	0,813	Valid

Sumber: Hasil Olah Data

Tabel 3. Nilai *Composite Reliability* dan AVE

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	AVE
Religiusitas (X1)	0,931	0,742
<i>Machiavellianism</i> (X2)	0,954	0,711
Diskriminasi (X3)	0,924	0,773
Informasi Perpajakan (X4)	0,930	0,699
Persepsi Wajib Pajak tentang Etika <i>Tax evasion</i> (Y)	0,934	0,689

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan bahwa pada pengujian ini seluruh nilai *outer loading* > 0,70, *composite reliability* > 0,50, dan AVE > 0,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap indikator dinyatakan valid.

Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Dalam menilai validitas diskriminan dapat menggunakan metode *fornell-larcker*, yaitu dilihat dari nilai AVE. Indikator dianggap memenuhi validitas diskriminan apabila akar AVE > korelasi antar variabel laten (Hair, J. F. J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M., 2017). Berikut ini merupakan hasil pengujian validitas diskriminan pada penelitian ini.

Tabel 4. Nilai *Fornell-Larcker*

Variabel	R (X1)	M (X2)	D (X3)	IP (X4)	PWPETE (Y)
R (X1)	0,862	0,222	-0,408	0,550	-0,370
M (X2)		0,843	-0,094	0,186	
D (X3)			0,879		
IP (X4)			-0,287	0,836	
PWPETE (Y)		-0,243	0,596	-0,261	0,830

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Tabel 4 memperlihatkan bahwa pada pengujian ini nilai *fornell-larcker* yang dilihat dari nilai akar AVE > korelasi antar variabel laten yang berarti setiap indikator valid.

Internal Consistency Reliability

Beberapa indikator untuk mengukur *internal consistency reliability* adalah *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Dalam menyatakan bahwa pengukurannya telah reliabel, maka nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* harus lebih dari 0,70 (Sunani, 2018). Berikut ini merupakan hasil pengujian *Internal Consistency Reliability* pada penelitian ini.

Tabel 5. Nilai *Internal Consistency Reliability*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Religiusitas (X1)	0,910	0,934
<i>Machiavellianism</i> (X2)	0,896	0,924
Diskriminasi (X3)	0,902	0,931
Informasi Perpajakan (X4)	0,947	0,954
Persepsi Wajib Pajak tentang Etika <i>Tax Evasion</i> (Y)	0,910	0,930

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Tabel 5 memperlihatkan bahwa pada pengujian ini nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* lebih dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukurannya telah reliabel.

Model Struktural (*Inner Model*)

Path Coefficients

Path coefficients yaitu pengujian untuk menentukan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rentang nilai *path coefficients* yaitu antara (-1) dan (+1). Nilai negatif berarti hubungan negatif, sedangkan nilai positif berarti hubungan positif. Semakin mendekati nilai 0 berarti hubungan dianggap semakin lemah (Hair, J. F. J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M., 2017). Berikut ini merupakan hasil pengujian *Path Coefficients* pada penelitian ini.

Tabel 6. Nilai *Path Coefficients*

Pengaruh Variabel	<i>Path Coefficients</i>
Religiusitas (X1) -> Persepsi Wajib Pajak tentang Etika <i>Tax Evasion</i> (Y)	-0,106
<i>Machiavellianism</i> (X2) -> Persepsi Wajib Pajak tentang Etika <i>Tax Evasion</i> (Y)	-0,167
Diskriminasi (X3) -> Persepsi Wajib Pajak tentang Etika <i>Tax Evasion</i> (Y)	0,531
Informasi Perpajakan (X4) -> Persepsi Wajib Pajak tentang Etika <i>Tax Evasion</i> (Y)	-0,019

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Tabel 6 memperlihatkan bahwa nilai *path coefficients* untuk pengaruh variabel Religiusitas (X1) terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Etika

Tax evasion (Y) sebesar -1,106 sehingga arah pengaruh antar kedua variabel adalah negatif. Pengaruh variabel *Machiavellianism* (X2) terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Etika *Tax evasion* (Y) sebesar -0,167 sehingga arah pengaruh antar kedua variabel adalah negatif. Pengaruh variabel Diskriminasi (X3) terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Etika *Tax evasion* (Y) sebesar 0,531 sehingga arah pengaruh antar kedua variabel adalah positif. Pengaruh variabel Informasi Perpajakan (X4) terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Etika *Tax evasion* (Y) sebesar -0,019 sehingga arah pengaruh antar kedua variabel adalah negatif

Coefficient of Determination (R²)

Nilai R² digunakan untuk mengukur keakuratan variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Kekuatan interpretasi nilai R² dapat dikategorikan tinggi jika nilai *square*-nya mencapai 0,75, moderat atau sedang jika nilainya mencapai 0,50, dan lemah jika nilainya mencapai 0,25 (Hair, J. F. J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M., 2017). Berikut ini merupakan hasil pengujian *Coefficient of Determination (R²)* pada penelitian ini.

Tabel 7. Nilai R Square

Variabel	R Square
Persepsi Wajib Pajak tentang Etika <i>Tax Evasion</i> (Y)	0,401

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,401 sehingga tingkat keakuratan variabel Religiusitas (X1), *Machiavellianism* (X2), Diskriminasi (X3), dan Informasi Perpajakan (X4) terhadap variabel Persepsi Wajib Pajak tentang Etika *Tax evasion* (Y) dikategorikan lemah.

Effect Size (f²)

Nilai f Square dikategorikan rendah apabila nilainya mencapai 0,02, sedang apabila nilainya mencapai 0,15, dan tinggi apabila nilainya mencapai 0,35. Ukuran di bawah nilai minimum, yaitu 0,02 menunjukkan bahwa tidak akan ada efek signifikan ketika satu variabel independen dihilangkan dari model (Hair, J. F. J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M., 2017). Berikut ini merupakan hasil pengujian *Effect Size (f²)* pada penelitian ini.

Tabel 8. Nilai *Effect Size (f²)*

Variabel	Persepsi Wajib Pajak tentang Etika <i>Tax Evasion</i> (Y)
Religiusitas (X1)	0,012
<i>Machiavellianism</i> (X2)	0,044
Diskriminasi (X3)	0,391
Informasi Perpajakan (X4)	0,000

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *f Square* pada variabel Religiusitas (X1) terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Etika *Tax evasion* (Y) sebesar 0,012 atau di bawah minimum sehingga tidak ada efek signifikan ketika variabel ini dihilangkan dari model. Pada variabel *Machiavellianism* (X2) terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Etika *Tax evasion* (Y) sebesar 0,044 sehingga memiliki kontribusi yang rendah. Pada variabel Diskriminasi (X3) terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Etika *Tax evasion* (Y) sebesar 0,391 sehingga memiliki kontribusi yang tinggi. Pada variabel Informasi Perpajakan (X4) terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Etika *Tax evasion* (Y) sebesar 0,000 atau di bawah minimum sehingga tidak ada efek signifikan ketika variabel ini dihilangkan dari model.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode *path coefficients* dengan teknik *bootstrapping*. Apabila *p-value* < 0,05 berarti berpengaruh dan apabila *p-value* > 0,05 berarti tidak berpengaruh. Pengaruh secara signifikan atau tidak signifikan ditentukan berdasarkan *t-statistics*. Jika nilai *t-statistics* lebih tinggi dari *t-table*, maka hipotesis ini terdukung (Sunani, 2018). Tingkat keyakinan penelitian ini yaitu 95% atau *t-table* = 1,96. Berikut ini merupakan hasil pengujian hipotesis antar variabel.

Tabel 9. Uji Hipotesis

Variabel	<i>t-statistics</i>	<i>p-values</i>	Keterangan
Religiusitas (X1) Persepsi Wajib Pajak tentang Etika <i>Tax evasion</i> (Y)	1,001	0,317	Ditolak
<i>Machiavellianism</i> (X2) -> Persepsi Wajib Pajak tentang Etika <i>Tax evasion</i> (Y)	1,930	0,054	Ditolak
Diskriminasi (X3) -> Persepsi Wajib Pajak tentang Etika <i>Tax evasion</i> (Y)	6,118	0,000	Diterima
Informasi Perpajakan (X4) -> Persepsi Wajib Pajak tentang Etika <i>Tax evasion</i> (Y)	0,217	0,828	Ditolak

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Tabel 22 menunjukkan bahwa H_1 ditolak karena hasil pengujiannya yaitu nilai *t-statistics* sebesar $1,001 < 1,96$ dan *p-value* sebesar $0,317 >$

0,05. H_2 ditolak karena hasil pengujiannya yaitu nilai *t-statistics* sebesar $1,930 < 1,96$ dan *p-value* sebesar $0,054 > 0,05$. H_3 diterima karena Hasil pengujiannya yaitu nilai *t-statistics* sebesar $6,118 > 1,96$ dan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ serta *path coefficients* sebesar 0,531. H_4 ditolak karena Hasil pengujian yang diperoleh yaitu nilai *t-statistics* sebesar $0,217 < 1,96$ dan *p-value* sebesar $0,828 > 0,05$.

Pembahasan

Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Etika *Tax Evasion*

Hipotesis ini ditolak karena pengaruh religiusitas terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion* tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi, misalnya kepatuhan terhadap peraturan hukum, keadaan ekonomi, faktor sosial, atau lain sebagainya. Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), salah satu faktor penentu niat dalam teori ini yaitu faktor sosial atau norma subjektif. Semakin besar dampak orang-orang di sekitar wajib pajak terhadap sikapnya untuk tidak mematuhi pajak, maka semakin besar pula keinginan wajib pajak tersebut untuk tidak mematuhi kewajibannya. Hal ini karena norma subjektif yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak cenderung dipengaruhi oleh tekanan sosial dari orang-orang yang berpengaruh di lingkungannya (Noermansyah & Aslamadin, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Saragih & Putra (2021) yang mengungkapkan bahwa persepsi etis tentang *tax evasion* tidak dipengaruhi oleh religiusitas. Akan tetapi, hasil penelitian bertolak belakang dari penelitian dari Afriyani (2023) serta Islam, A., Rashid, M. H. U., Hossain, S. Z., & Hashmi, R. (2020) yang menyatakan bahwa *religiosity* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Pengaruh *Machiavellianism* terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Etika *Tax Evasion*

Hipotesis ini ditolak karena walaupun seseorang yang bersifat *machiavellianism* sering kali melakukan perbuatan tidak sesuai etika demi keuntungan pribadi, tidak dapat dipastikan ini akan secara langsung memengaruhi pandangan wajib pajak tentang etika *tax evasion*. Dalam konteks persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*, TPB menjelaskan bahwa keputusan mereka untuk mematuhi atau melanggar pajak dipengaruhi oleh niat mereka untuk melakukan tindakan tersebut yang dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap penggelapan pajak, norma sosial yang mereka rasakan, dan persepsi tentang kontrol atas perilaku mereka. Meskipun seseorang yang memiliki ciri-ciri

machiavellianism cenderung untuk mengabaikan norma sosial, bukan berarti bahwa hal tersebut secara langsung memengaruhi pandangan wajib pajak tentang etika *tax evasion*. Temuan penelitian ini mencerminkan kesimpulan dari penelitian Sunani, A., Subroto, B., & Prihatiningtias, Y. W. (2014) dan Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021) yang mengungkapkan bahwa persepsi etis penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh *machiavellianism*. Akan tetapi, temuan penelitian ini bertentangan dengan Kisman & Junaidi (2022) serta Atmoko (2022) yang mengungkapkan bahwa *machiavellianism* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Etika *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa diskriminasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*. Jika individu merasa didiskriminasi, hal ini dapat memberi pengaruh pada perspektif wajib pajak tentang norma sosial, termasuk perspektif mereka mengenai etika penggelapan pajak. Diskriminasi juga dapat memicu reaksi moral negatif atau menyebabkan individu merasa lebih bertanggung jawab untuk bertindak secara etis sebagai bentuk protes terhadap perlakuan tidak adil yang mereka terima.

Salah satu faktor penentu niat dalam TPB yaitu persepsi terhadap kendali perilaku, persepsi ini berperan dalam membentuk niat dan perilaku. Jika wajib pajak percaya bahwa mereka memiliki kontrol yang rendah terhadap tindakan mereka terkait dengan pajak, seperti menghindari atau mematuhi, maka hal ini dapat memengaruhi persepsi mereka tentang etika *tax evasion*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Rachmadeka & Andayani (2021) serta Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021) yang mengungkapkan bahwa diskriminasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Akan tetapi, temuan penelitian ini bertentangan dengan Pratiwi & Prabowo (2019) yang mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh diskriminasi pajak.

Pengaruh Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Etika *Tax Evasion*

Hipotesis ini ditolak karena untuk membentuk pandangan wajib pajak tentang etika *tax evasion* terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh, meliputi norma sosial, nilai-nilai pribadi, dan sebagainya. Sejalan dengan tiga faktor utama

dalam TPB yang memengaruhi niat dan perilaku individu, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam beberapa kasus, informasi perpajakan tidak secara langsung memengaruhi persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak. Misalnya, seseorang memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan, tetapi sikap mereka terhadap penggelapan pajak dapat negatif atau positif tergantung pada faktor-faktor lain seperti norma di lingkungan mereka atau pengalaman pribadi mereka. Norma sosial atau tekanan dari orang-orang di sekitar seseorang mendukung atau membenarkan penggelapan pajak, maka informasi perpajakan tidak cukup kuat untuk memengaruhi persepsi mereka tentang etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021) yang menyatakan bahwa informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak. Akan tetapi, temuan penelitian bertentangan dengan Rachmadeka & Andayani (2021) yang mengungkapkan bahwa informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan hasil uji dalam studi ini, maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas, *machiavellianism*, dan informasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*. Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*. Berdasarkan kesimpulan ini, maka saran untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang serupa adalah agar peneliti mengembangkan sampel untuk hasil uji dapat digeneralisasikan ke masyarakat secara lebih luas atau mempertimbangkan penggunaan sampel dari kantor pelayanan pajak yang berbeda untuk perbandingan hasil penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel moderasi atau variabel lain yang memengaruhi pandangan wajib pajak tentang etika *tax evasion*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyani, N. (2023). Etika dan *tax evasion*. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(4), 1058. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i04.p13>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. <https://doi.org/10.4135/9781446249215.n22>
- Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021). Pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib

- pajak mengenai penggelapan pajak (Studi pada wajib pajak orang pribadi di universitas majalengka). *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Tahun*, 2(2), 182–200.
- Atmoko, A. D. (2022). Can religious and machiavellian influence *tax evasion*? research based on gender and age perspective. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 106–124. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.20803>
- Hair, J. F. J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) second edition*.
- Islam, A., Rashid, M. H. U., Hossain, S. Z., & Hashmi, R. (2020). Public policies and *tax evasion*: evidence from SAARC countries. *Heliyon*, 6(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05449>
- Kisman, Z., & Junaidi, J. (2022). The effect of love of money, machiavellianism, and tax rates on *tax evasion*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 102–110. <https://doi.org/10.32639/jiak.v11i2.209>
- Lestari, S. (2021). *Pengaruh Machiavellian, love of money dan status sosial ekonomi terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderating: studi kasus pada wajib pajak badan di Kota Semarang* [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13466>
- Matitaputty, J. S., & Adi, P. H. (2021). Machiavellianism dimensions, religiosity, social environment, and *tax evasion*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 1–26. <https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.3738>
- Mustofa, A. W., & Suhartini, D. (2022). Determinan Etika Wajib Pajak dalam Melakukan Tax Avoidance dan *Tax evasion*. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(1), 699–712. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1930>
- Noermansyah, A. L., & Aslamadin, I. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat ketidakpatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 329–339. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i2.20432>
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak: persepsi wajib pajak orang pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>
- Putra, P. (2021). *Kemplang pajak hingga rp2,6 miliar, 3 pelaku ini dijebloskan ke tahanan*. <https://jatim.inews.id/berita/kemplang-pajak-hingga-rp26-miliar-3-pelaku-ini-dijebloskan-ke-tahanan>
- Rachmadeka, A., & Andayani, S. (2021). Pengaruh sistem, diskriminasi, informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi tentang etika *tax evasion* (Studi Kasus pada KPP Pratama Madiun). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(3), 1699–1718. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1559>

- Rambe, M. F. P. (2021). *Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama pekanbaru tampan)* [Universitas Islam Indonesia]. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/36313/17312184 Muhammad Fiqri Pratama Rambe.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/36313/17312184_Muhammad%20Fiqri%20Pratama%20Rambe.pdf?sequence=1)
- Ramdani, F., Ulfah, Y., & Pattisahusiwa, S. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(3).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Saragih, A. H., & Putra, I. D. N. S. (2021). Ethical perception of *tax evasion*: determinants and consequences on voluntary tax compliance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(1), 1–14. <https://doi.org/10.9744/jak.23.1.1-14>
- Sunani, A. (2018). Pengaruh iklim etika dan pengalaman kerja terhadap persepsi etis akuntan publik mengenai penggelapan pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 2(1), 38–49. <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i1.691>
- Sunani, A., Subroto, B., & Prihatiningtias, Y. W. (2014). Do ethical climate and machiavellianism affect ethical perceptions of earnings management? Evidence from Indonesia. *Global Journal of Business and Social Science Review*, 2(3), 85–92.
- Vo, T. T. D., Tuliiao, K. V., & Chen, C. W. (2022). Managers' ethics of *tax evasion*: the roles of family, religion, and social conditions. *E a M: Ekonomie a Management*, 25(3), 53–68. <https://doi.org/10.15240/tul/001/2022-3-004>
- Yuliati, A., & Santoso, R. (2020). Analisis penerimaan pajak penghasilan badan di kantor pelayanan pajak pratama mulyorejo surabaya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 180–193. <https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2317>
- Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 41–64. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6441>